



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 83/PP.06.2-Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sukoharjo tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-

Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 78/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 102/PP.06.2-BA/3311/KPU-Kab/XI/2019 tertanggal 1 November 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau, Pedoman Teknis Survei dan Jajak Pendapat Tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



SUDARNI

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKOHARJO  
NOMOR : 83/PP.06.2-Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKOHARJO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 perlu dilaksanakan sosialisasi.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, KPU Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Sukoharjo;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih

untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

### C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemilihan;
2. Pendidikan Pemilih;
3. Partisipasi Masyarakat;
4. Pemantau Pemilihan;
5. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
6. Akses Data dan Informasi.

### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Sukoharjo 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pilbup Sukoharjo 2020 di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan Pilbup Sukoharjo 2020 di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah

- panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan Pilbup Sukoharjo 2020 di tingkat desa/kelurahan.
6. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Sukoharjo 2020.
  7. Pemilih adalah penduduk di Kabupaten Sukoharjo yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
  8. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020.
  9. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
  10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pilbup Sukoharjo, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020.
  11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pilbup Sukoharjo 2020.
  12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020.
  13. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
  14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020.
  15. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020.
  16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020.
  17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU dan KPU Kabupaten Sukoharjo kepada Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020 yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau

Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Sukoharjo bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020, peserta Pilbup Sukoharjo 2020, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu
19. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.
21. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI PILBUP SUKOHARJO 2020, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Penyelenggara Pilbup Sukoharjo 2020 dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

## BAB II

### SOSIALISASI PILBUP SUKOHARJO 2020

#### A. SASARAN SOSIALISASI PILBUP SUKOHARJO 2020

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020, meliputi komponen:
  - a. Pemilih yang berbasis :
    - 1) Keluarga;
    - 2) Pemilih pemula;
    - 3) Pemilih muda;
    - 4) Pemilih perempuan;
    - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
    - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
    - 7) Kaum marjinal;
    - 8) Komunitas;
    - 9) Keagamaan;
    - 10) Relawan demokrasi; dan
    - 11) Warga internet (netizen).
  - b. Masyarakat umum;
  - c. Media massa;
  - d. Partai politik;
  - e. Pengawas;
  - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - g. Organisasi Kemasyarakatan;
  - h. Masyarakat adat; dan
  - i. Instansi Pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. KPU Kabupaten Sukoharjo dalam mencapai seluruh kelompok sasaran Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 dan Pendidikan Pemilih.
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di

wilayah kerja masing-masing.

## B. MATERI SOSIALISASI PILBUP SUKOHARJO 2020

1. Materi Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020, mencakup:
  - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020 yang terdiri dari:
    - 1) Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
    - 2) Pencalonan dalam Pilbup Sukoharjo 2020;
    - 3) Kampanye dalam Pilbup Sukoharjo 2020;
    - 4) Dana kampanye peserta Pilbup Sukoharjo 2020;
    - 5) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Sukoharjo 2020; dan
    - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pilbup Sukoharjo 2020.
  - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020.
2. Materi Sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
  - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
  - d. Penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 2), meliputi:
  - a. Jadwal pencalonan Paslon;
  - b. Persyaratan pencalonan bagi Paslon;
  - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Paslon;
  - d. Penetapan Paslon;
  - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Paslon.
4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 3), meliputi:
  - a. Ketentuan kampanye;
  - b. Jadwal kampanye;
  - c. Visi, misi dan program kerja Paslon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 4), meliputi:

- a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
  - b. Jenis laporan dana kampanye;
  - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
  - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Sukoharjo 2020 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 5), meliputi:
- a. Tata cara pemungutan suara;
  - b. Tata cara penghitungan suara;
  - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - d. Pengumuman hasil Pilbup Sukoharjo 2020.
7. Dalam Pilbup Sukoharjo 2020 dengan 1 (satu) Paslon, KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan materi sosialisasi kepada Pemilih.
8. Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

### C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020, dilakukan melalui:
  - a. Forum warga;
  - b. Komunikasi tatap muka;
  - c. Media massa;
  - d. Bahan sosialisasi;
  - e. Mobilisasi sosial;
  - f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - g. Laman KPU Kabupaten Sukoharjo;
  - h. Papan pengumuman KPU Kabupaten Sukoharjo;
  - i. Media sosial;
  - j. Media kreasi; dan/atau
  - k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pilbup Sukoharjo 2020 dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
  - a. Diskusi;
  - b. Seminar;
  - c. *Workshop*;

- d. Rapat kerja;
  - e. Pelatihan;
  - f. Ceramah;
  - g. Simulasi;
  - h. Gelar wicara (talkshow); dan/atau
  - i. Metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dilakukan pada :
- a. Media massa cetak; dan/atau
  - b. Media massa elektronik meliputi:
    - 1) radio;
    - 2) televisi; dan/atau
    - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui :
- a. tulisan;
  - b. gambar;
  - c. suara; dan/atau
  - d. *audiovisual*.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, terdiri atas :
- a. Penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi :
    - 1) brosur;
    - 2) *leaflet*;
    - 3) *pamflet*;
    - 4) *booklet*;
    - 5) poster;
    - 6) *folder*; dan/atau
    - 7) stiker;
  - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi :
    - 1) spanduk;
    - 2) *banner*;
    - 3) baliho;
    - 4) *billboard/videotron*; dan/atau
    - 5) umbul-umbul;
  - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

6. Media kreasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
  - a. kesenian tradisional;
  - b. modern;
  - c. kontemporer;
  - d. seni musik;
  - e. seni tari;
  - f. seni lukis;
  - g. sastra; dan/atau
  - h. seni peran;
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten Sukoharjo.
8. KPU Kabupaten Sukoharjo dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

#### D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis :
  - a. Keluarga;
  - b. Pemilih pemula;
  - c. Pemilih muda;
  - d. Pemilih perempuan;
  - e. Pemilih penyandang disabilitas;
  - f. Kaum marjinal;
  - g. Komunitas;
  - h. Keagamaan;
  - i. Relawan demokrasi; dan/atau
  - j. Warga internet (*netizen*).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui :
  - a. Mobilisasi sosial;
  - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. Media lokal atau tradisional;
  - d. Rumah Pintar Pemilu;
  - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
  - f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  - g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana angka 1, KPU Kabupaten Sukoharjo dapat bekerjasama dengan :

- a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. Komunitas masyarakat;
  - c. Organisasi keagamaan;
  - d. Kelompok adat;
  - e. Badan hukum;
  - f. Lembaga pendidikan;
  - g. Instansi pemerintah;
  - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
  - i. media massa cetak dan elektronik; dan/atau
  - j. Organisasi/lembaga lainnya.
4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

#### A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PILBUP SUKOHARJO 2020

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Sukoharjo berwenang:
  - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pilbup Sukoharjo 2020;
  - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sukoharjo, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Sukoharjo 2020 mempunyai tanggungjawab:
  - a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
  - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pilbup Sukoharjo 2020.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020.
5. Tanggungjawab dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sukoharjo.

#### B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pilbup Sukoharjo 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pilbup Sukoharjo 2020;
  - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;

- d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pilbup Sukoharjo 2020;
  - e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pilbup Sukoharjo 2020;
  - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020;
  - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020; dan
  - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
    - a. Menghormati hak orang lain;
    - b. Bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
    - c. Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat; dan
    - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

### C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pilbup Sukoharjo 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pilbup Sukoharjo 2020, dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020;
  - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pilbup Sukoharjo 2020;
  - c. Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020;
  - d. Pendidikan Pemilih;
  - e. Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020; dan
  - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pilbup Sukoharjo 2020 dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pilbup Sukoharjo 2020 dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Paslon;
  - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbup Sukoharjo Tahun 2020;

- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pilbup Sukoharjo 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.

#### D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PILBUP SUKOHARJO 2020

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf a terdiri atas :
  - a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
  - b. Keterlibatan dalam tahapan Pilbup Sukoharjo 2020; dan/atau
  - c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa :
  - a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - b. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - d. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. Menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - i. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau

- peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pilbup Sukoharjo 2020, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pilbup Sukoharjo 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Keterlibatan masyarakat, dapat berupa :
    - a. Menjadi petugas penyelenggara Pilbup Sukoharjo 2020;
    - b. Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pilbup Sukoharjo 2020; dan/atau
    - c. Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pilbup Sukoharjo 2020.
  5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 dapat berupa :
    - a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
    - b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 sesuai dengan hasil evaluasi.

#### E. SOSIALISASI PILBUP SUKOHARJO 2020

1. Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 dilakukan dengan tujuan :
  - a. Menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pilbup Sukoharjo 2020; dan
  - b. Meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Sukoharjo.
4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan

- media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 dengan 1 (satu) Paslon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
  6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, dilarang :
    - a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
    - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Paslon;
    - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
    - d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga Negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### F. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan :
  - a. Membangun pengetahuan politik;
  - b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut :
  - a. Pemilih pemula;
  - b. Pemilih muda;
  - c. Pemilih perempuan;
  - d. Pemilih penyandang disabilitas;
  - e. Kaum marjinal;
  - f. Komunitas;
  - g. Keagamaan;
  - h. Relawan demokrasi; dan/atau
  - i. Warga internet (*netizen*).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan,

kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV  
PEMANTAUAN PILBUP SUKOHARJO 2020

1. Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020 dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
  - a. Bersifat independen;
  - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing dan KPU Kabupaten Sukoharjo bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - b. Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020 dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
  - c. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Kabupaten Sukoharjo.
6. Pemantau Pemilihan Asing, wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo

Tahun 2020.

8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
  - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. Alokasi anggota Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020, masing-masing di daerah Kabupaten Sukoharjo dan Kecamatan;
  - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020 dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020;
  - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
  - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020;
  - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020;
  - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo.
10. KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
11. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kabupaten Sukoharjo dapat membentuk panitia Akreditasi.
12. KPU Kabupaten Sukoharjo memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
14. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Paslon terpilih apabila

- pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pilbup Sukoharjo 2020.
15. Akreditasi Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pilbup Sukoharjo 2020.
  16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi, kepada KPU Kabupaten Sukoharjo tempat dilakukannya pemantauan.
  17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
  18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020 serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari :
    - a. KPU Kabupaten Sukoharjo untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
  19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020.
  20. KPU dan KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu dan Panwas Kabupaten Sukoharjo.
  21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resor Sukoharjo.
  22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020 pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo.
  23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan

- tanda pengenal pemantau Pilbup Sukoharjo 2020.
24. Tanda pengenal Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020, terdiri atas:
    - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
  25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.
  26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
  27. Tanda pengenal Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020, memuat informasi tentang :
    - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas
    - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
    - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
    - d. Wilayah kerja pemantauan;
    - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
    - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
  28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
  29. Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.
  30. Tanda pengenal Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020 berukuran 10 x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
  31. Lembaga Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020 mempunyai hak :
    - a. Mendapatkan akses di wilayah Pilbup Sukoharjo 2020;
    - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
    - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020 dari tahap awal sampai tahap akhir;
    - d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;

- e. Mendapat akses informasi dari KPU dan KPU Kabupaten Sukoharjo; dan
  - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020 sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020.
32. Dalam hal Pilbup Sukoharjo 2020 dengan 1 (satu) Paslon, Pemantau yang telah mendapatkan akreditasi, dapat melakukan Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020 di tempat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
33. Lembaga Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020 wajib :
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mematuhi kode etik Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020;
  - c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
  - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Resor Sukoharjo sebelum melaksanakan Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020;
  - e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020;
  - f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
  - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020 serta tenaga pendukung kepada KPU dan/atau KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan wilayah pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020;
  - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pilbup Sukoharjo 2020 serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pilbup Sukoharjo 2020 dan kepada Pemilih;
  - j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  - k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020 secara obyektif dan tidak berpihak;
  - l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan

disampaikan kepada pengawas Pilbup Sukoharjo 2020;

- m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020 yang dilakukan dengan menglarifikasi kepada KPU dan KPU Kabupaten Sukoharjo;
  - n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kabupaten Sukoharjo dan pengawas Pilbup Sukoharjo 2020 sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
  - o. Menyampaikan laporan hasil pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020 kepada KPU, KPU Kabupaten Sukoharjo dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
34. Lembaga Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020 dilarang :
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020;
  - b. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  - c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pilbup Sukoharjo 2020;
  - d. Memihak kepada peserta Pilbup Sukoharjo 2020 tertentu;
  - e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pilbup Sukoharjo 2020;
  - f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pilbup Sukoharjo 2020;
  - g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020 merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
  - h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  - i. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
  - j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020 termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pilbup Sukoharjo 2020; dan
  - k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020.

35. Kode etik Lembaga Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020, meliputi :
  - a. non partisan dan netral;
  - b. tanpa kekerasan;
  - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d. sukarela;
  - e. integritas;
  - f. kejujuran;
  - g. obyektif;
  - h. kooperatif;
  - i. transparan;
  - j. kemandirian.
36. Lembaga Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020 yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020.
37. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
38. Sebelum mencabut status dan hak, KPU dan KPU Kabupaten Sukoharjo wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020.
39. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Sukoharjo melaporkan kepada KPU.
41. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
42. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
43. Lembaga Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020 yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020 dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pilbup Sukoharjo 2020 dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pilbup Sukoharjo 2020.
44. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak

pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantaun Pilbup Sukoharjo 2020, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020.
2. Survei atau Jajak Pendapat, meliputi :
  - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
  - b. Survei tentang hasil Pilbup Sukoharjo 2020;
  - c. Survei tentang kelembagaan Pilbup Sukoharjo 2020 seperti penyelenggara Pilbup Sukoharjo 2020, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
  - d. Survei tentang Paslon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Sukoharjo.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020, dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pilbup Sukoharjo 2020 di KPU Kabupaten Sukoharjo.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020 wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Sukoharjo dengan menyerahkan dokumen, berupa :
  - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. Susunan kepengurusan lembaga;
  - c. Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020 telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
  - e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - f. surat pernyataan bahwa lembaga survei :
    - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pilbup Sukoharjo 2020;
    - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbup Sukoharjo 2020;

- 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
  - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 yang aman, damai, tertib, dan lancar;
  - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
  - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020 dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbup Sukoharjo 2020.
  8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020 dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbup Sukoharjo 2020.
  9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pilbup Sukoharjo 2020 wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Sukoharjo tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020 terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020.
  10. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020 sebagaimana, meliputi:
    - a. Informasi terkait status badan hukum;
    - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup

- Sukoharjo 2020;
- c. Susunan kepengurusan;
  - d. Sumber dana;
  - e. Alat yang digunakan;
  - f. Metodologi yang digunakan; dan
  - g. Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilbup Sukoharjo 2020.
11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020 wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Sukoharjo.
  12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020 dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo dengan menyertakan identitas pelapor.
  13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten Sukoharjo dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020.
  14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
    - a. 2 (dua) orang akademisi;
    - b. 2 (dua) orang professional/ahli lembaga Survei; dan
    - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo.
  15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
  16. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo.
  17. KPU Kabupaten Sukoharjo dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020 yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
  18. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020.
  19. Pelanggaran tindak pidana Pilbup Sukoharjo 2020 yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan

Cepat Hasil Pilbup Sukoharjo 2020, dikenai sanksi sesuai Undang-Undang tentang Pemilihan.

## BAB VI

### AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten Sukoharjo memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada laman website KPU Kabupaten Sukoharjo ([www.kpu.Sukohariokab.go.id](http://www.kpu.Sukohariokab.go.id)), papan pengumuman, Rumah Pintar Pemilu, PPID KPU Kabupaten Sukoharjo dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB VII  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Sukoharjo dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pilbup Sukoharjo Tahun 2020.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



SUDARNI